

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Penilaian Pengendalian Intern**

Standar Pekerjaan Lapangan yang kedua menyatakan: “Pemahaman memadai atas pengendalian intern klien harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.”

Dalam SA 319.1 dinyatakan bahwa penilaian (pemahaman memadai) atas pengendalian intern merupakan suatu proses yang berkaitan. Proses ini terdiri dari:

1. Perolehan pemahaman pengendalian intern.
2. Pertimbangan atas pengendalian intern dalam penaksiran risiko pengendalian.
3. Pencarian pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran.

#### **2.2. Pemahaman Pengendalian Intern**

Dalam SA 319.1 dikemukakan bahwa dalam semua audit, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan.

Dalam mempertimbangkan pemahaman atas pengendalian intern yang diperlukan untuk merencanakan audit, auditor mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari sumber lain tentang tipe salah saji yang dapat terjadi, risiko bahwa salah saji tersebut dapat terjadi, dan faktor yang mempengaruhi desain pengujian substantif. Sumber lain pengetahuan seperti itu mencakup audit sebelumnya dan pemahaman tentang industri yang menjadi tempat beroperasinya entitas. Auditor juga mempertimbangkan taksirannya tentang risiko bawaan, pertimbangan tentang materialitas, dan kompleksitas dan kecanggihan operasi dan sistem entitas, termasuk apakah metode pengendalian pengolahan informasi didasarkan pada prosedur manual yang terlepas dari komputer atau sangat

tergantung pada pengendalian berbasis komputer. Semakin kompleks dan canggih operasi dan sistem entitas, mungkin perlu mencurahkan perhatian ke komponen pengendalian intern untuk memperoleh pemahaman terhadap komponen tersebut yang diperlukan untuk mendesain pengujian substantif yang efektif.

### 2.2.1. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.2), pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Sedangkan definisi pengendalian intern menurut COSO yang dikutip oleh Boynton and Kell (2001:325) adalah sebagai berikut:

*“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

- a. Reliability of financial reporting*
- b. Compliance with applicable laws and regulations*
- c. Effectiveness and efficiency of operation.”*

Dari kedua definisi pengendalian tersebut, terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

#### **2.2.2. Pertimbangan Pengendalian Intern dalam Perencanaan Audit**

Dalam semua audit, auditor harus memperoleh pemahaman masing-masing dari lima komponen pengendalian intern yang cukup untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan suatu audit laporan keuangan, dan apakah pengendalian tersebut dioperasikan. Dalam perencanaan audit, pengetahuan tersebut harus digunakan untuk:

- a. Mengidentifikasi tipe salah saji potensial.
- b. Mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko salah saji material.
- c. Mendesain pengujian substantif.

Sifat, waktu, dan luasnya prosedur yang dipilih auditor untuk memperoleh pemahaman akan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman sebelumnya dengan entitas, sifat pengendalian khusus yang terkait, dan sifat dokumentasi pengendalian khusus yang diselenggarakan oleh entitas. Apakah suatu pengendalian telah dioperasikan adalah berbeda dari efektivitas operasinya.

Dalam memperoleh pengetahuan tentang apakah pengendalian telah dioperasikan, auditor menentukan bahwa entitas telah menggunakannya. Di lain pihak, efektivitas operasi, berkaitan dengan bagaimana pengendalian tersebut diterapkan, konsistensi penerapannya, dan oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan.

Pemahaman auditor tentang pengendalian intern kadang-kadang menimbulkan keraguan tentang dapat atau tidaknya laporan keuangan entitas diaudit. Integritas manajemen entitas mungkin sangat rendah sehingga menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa risiko salah representasi manajemen dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga suatu audit tidak dapat dilaksanakan. Sifat dan luasnya catatan entitas dapat mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa tidak mungkin bukti audit kompeten yang cukup akan tersedia untuk mendukung pendapat atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Arens et al (2005:284), yang menjadi dasar pemikiran dipertimbangkannya pengendalian intern adalah agar dapat memenuhi empat karakteristik sebagai berikut:

*“Auditability, Potential Material Misstatement, Detection Risk, Design of Test”.*

Dari hal yang dikemukakan oleh Arens et al dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Auditability* (Kemampuan untuk diaudit)

Auditor hendaknya memperoleh informasi mengenai integritas manajemen dan sifat serta luas catatan akuntansi yang memadai sehingga bukti kompeten yang memadai tersedia untuk mendukung saldo laporan keuangan.

2. *Potential Material Misstatement* (Salah Saji Material yang Potensial Terjadi)

Pemahaman hendaknya memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan (*errors*) dan kekeliruan (*irregularities*) yang potensial dan dapat mempengaruhi laporan keuangan serta menetapkan

risiko akibat kesalahan dan ketidakberesan yang terjadi dalam jumlah yang material pada laporan keuangan.

3. *Detection Risk* (Risiko Pendeteksian)

Informasi mengenai pengendalian intern digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang mempengaruhi risiko deteksi yang direncanakan. Risiko deteksi adalah risiko bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan kekeliruan yang melebihi jumlah yang dapat di toleransi.

4. *Design of Test* (Rancangan dari Test)

Informasi yang diperoleh hendaknya memungkinkan auditor untuk mendesain pengujian efektif terhadap laporan keuangan. Pengujian-pengujian yang dapat dilakukan diantaranya: pengujian kebenaran nilai pada transaksi dan saldo akhir, dan prosedur analitis.

### 2.2.3. Komponen Pengendalian Intern

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.2), pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini:

- "1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan."

Dari definisi yang dikemukakan di muka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup berikut ini:

- a. Integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit.

- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
- e. Struktur organisasi.
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang lingkungan pengendalian untuk memahami sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan dewan komisaris terhadap lingkungan pengendalian intern, dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif. Auditor harus memusatkan pada substansi pengendalian daripada bentuk luarnya, karena pengendalian mungkin dibangun namun tidak dilaksanakan. Sebagai contoh, manajemen dapat membangun aturan perilaku formal namun bertindak yang melanggar apa yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.

Pada waktu memperoleh pemahaman tentang lingkungan pengendalian, auditor mempertimbangkan dampak kolektif kekuatan dan kelemahan dalam berbagai faktor lingkungan pengendalian terhadap lingkungan pengendalian. Kekuatan dan kelemahan manajemen dapat berdampak pervasif terhadap pengendalian intern. Sebagai contoh, pengendalian oleh manajer pemilik dapat mengurangi tidak adanya pemisahan tugas dalam suatu bisnis kecil atau dewan komisaris yang aktif dan independen dapat mempengaruhi filosofi dan gaya operasi manajemen senior dalam entitas yang lebih besar.

## 2. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh, penaksiran risiko dapat ditujukan ke bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang dicatat dalam laporan keuangan. Risiko yang relevan dengan

pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan dengan peristiwa dan transaksi khusus.

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi.
- b. Personel baru.
- c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki.
- d. Teknologi baru.
- e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru.
- f. Restrukturisasi korporasi.
- g. Operasi luar negeri
- h. Standar akuntansi baru.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang proses penaksiran risiko entitas untuk memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditujukan ke risiko tersebut. Pengetahuan ini mungkin mencakup pemahaman tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko, melakukan estimasi signifikannya risiko, menaksir kemungkinan terjadinya, dan menghubungkannya dengan pelaporan keuangan.

Penaksiran risiko entitas berbeda dari pertimbangan auditor tentang risiko audit dalam audit atas laporan keuangan. Tujuan penaksiran risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berdampak terhadap tujuan entitas. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor melakukan penaksiran atas risiko bawaan dan risiko pengendalian untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi dalam laporan keuangan.

### 3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:

- a. Review terhadap kinerja.
- b. Pengolahan informasi.
- c. Pengendalian fisik.
- d. Pemisahan fungsi.

Auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas aktivitas pengendalian yang relevan untuk merencanakan audit. Pada waktu auditor memperoleh pemahaman tentang komponen lain, ia juga mungkin memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian. Auditor harus mempertimbangkan pengetahuan tentang ada atau tidak adanya aktivitas pengendalian yang diperoleh dari pemahaman terhadap komponen lain dalam menentukan apakah diperlukan perhatian tambahan untuk memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian dalam perencanaan audit. Biasanya, perencanaan audit tidak mensyaratkan pemahaman atas aktivitas pengendalian yang berkaitan dengan setiap saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan atau setiap asersi yang relevan dengan saldo akun, transaksi, dan pengungkapan tersebut.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:

- a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
- b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
- c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
- d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti komputer dan *electronic data interchange*) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi.

Di samping itu, auditor harus memperoleh pengetahuan memadai cara yang digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan dan masalah-masalah signifikan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

## 5. Pemantauan

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian intern. Manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya.

Pemantauan adalah prose penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung selama terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan *customers* dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang tipe utama aktivitas entitas yang digunakan untuk memantau pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan, termasuk bagaimana aktivitas tersebut digunakan untuk melaksanakan tindakan koreksi.

Sedangkan menurut Arens et al (2005:274-282), pengendalian intern merupakan satuan usaha yang terdiri atas lima komponen, yaitu:

1. *Control environment*
2. *Risk assesment*
3. *Control activities*
4. *Information and communication*
5. *Monitoring.*"

Dari definisi yang dikemukakan oleh Arens et al di muka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Control environment* (Lingkungan pengendalian)

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha terhadap pengendalian dan arti pentingnya terhadap satuan usaha tersebut. Unsur-unsur lingkungan pengendalian ini terdiri dari:

a. *Integrity and ethical values* (Integritas dan nilai-nilai etika)

Efektivitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri manusia yang mendesain dan melaksanakannya. Integritas dan nilai-nilai etika merupakan suatu standar etika dan tingkah laku yang berlaku dalam suatu perusahaan dan juga mencakup tindakan-tindakan manajemen yang dapat meniadakan atau mengurangi godaan untuk bertindak tidak etis terhadap karyawan, seperti tidak jujur, mangkir kerja, atau lain-lain.

b. *Commitment to competence* (Komitmen terhadap kompetensi)

Kompeten adalah pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Untuk mencapai tujuan aktivitas, setiap orang dalam tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan perpaduan antara kecerdasan, pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c. *Board of directors or audit committee participation* (Partisipasi dewan komisaris atau komite audit)

Suatu *board of directors* yang efektif terpisah atau independen dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas manajemen, Komite audit harus membantu dewan komisaris dalam melaksanakan

tugasnya. Dengan adanya kerjasama antara dewan komisaris dan dewan komite akan menciptakan pengendalian yang baik dalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

d. *Management's philosophy and operating style* (Falsafah manajemen dan gaya operasi)

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan dan gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan.

e. *Organizational structure* (Struktur organisasi)

Struktur organisasi suatu satuan usaha menetapkan garis tanggung jawab dan wewenang yang ada, serta garis arus komunikasi. Auditor perlu memahami struktur organisasi perusahaan sehingga ia dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional usaha dan menaksir bagaimana kebijaksanaan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dilaksanakan.

f. *Assignment of authority and responsibility* (Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab)

Hal ini mencakup pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengendalian-pengendalian lain yang berhubungan, seperti rencana operasi perusahaan, deskripsi tugas pegawai dan kebijaksanaan yang terkait.

g. *Human resource policies and practices* (Kebijakan dan praktek sumber daya manusia)

Aspek penting dari pengendalian dalam suatu perusahaan adalah karyawan. Karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya dapat menciptakan pengendalian yang efektif, oleh karena itu metode perekrutan, evaluasi dan kompensasi karyawan merupakan bagian penting dari pengendalian intern.

## 2. *Risk assesment* (Penaksiran risiko)

Penaksiran risiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia.

Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dalam implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

- a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.
- b. Perubahan standar akuntansi.
- c. Hukum dan peraturan baru.
- d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
- e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut.

## 3. *Control activities* (Aktivitas pengendalian)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa tindakan tertentu telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Secara umum, prosedur pengendalian dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu:

### a. *Adequate separation of duties* (Pemisahan tugas yang memadai)

Pemisahan tugas bervariasi di berbagai organisasi, tetapi yang paling penting adalah memisahkan fungsi pencatatan (*recording*), fungsi otorisasi (*authorization*), dan fungsi penyimpanan (*custody*).

- b. *Proper authorization of transaction and activities* (Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas)

Setiap transaksi hendaknya diotorisasi dengan memadai untuk menunjang pengendalian yang memadai. Otorisasi adalah keputusan tentang kebijakan, baik untuk transaksi yang bersifat umum maupun khusus.

- c. *Adequate documents and records* (Dokumen dan catatan yang memadai)

Dokumen dan catatan adalah objek fisik di mana transaksi dicatat dan diikhtisarkan. Dokumentasi haruslah memadai untuk membentuk keyakinan bahwa setiap aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh catatan dicatat dengan benar.

- d. *Physical control over assets and records* (Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan)

Jenis ukuran perlindungan yang paling utama untuk mengamankan aktiva dan catatan atau penggunaan tindakan pencegahan fisik, seperti tersedianya gudang untuk mencegah pencurian persediaan.

- e. *Independent checks on performance* (Pengecekan independen atas kinerja)

Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan yang berkesinambungan atas keempat prosedur lain, yang seringkali disebut sebagai pengecekan independen atau verifikasi intern.

4. *Information and communication* (Informasi dan komunikasi)

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

- a. Sah
- b. Telah diotorisasi
- c. Telah dicatat

- d. Telah dinilai dengan wajar
- e. Telah digolongkan dengan wajar
- f. Telah dicatat dalam periode seharusnya
- g. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua orang yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpanan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

5. *Monitoring* (Pemantauan)

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern yang telah dilaksanakan sepanjang waktu. Aktivitas ini meliputi penilaian secara langsung atas pengendalian intern yang telah dijalankan oleh perusahaan untuk menentukan bahwa pengendalian telah dilakukan dengan semestinya.

Komponen pengendalian intern dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1.

#### **2.2.4. Tujuan Pengendalian Intern**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.2), tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- "1. Keandalan informasi keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku"

Menurut Mulyadi (2002:180), tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu:

- "1. Keandalan informasi keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi."

Senada dengan yang dikemukakan oleh Mulyadi dan IAI, tujuan pengendalian intern menurut COSO yang dikutip oleh Boynton and Kell (2001:254) adalah sebagai berikut:

- "1. Reliability of financial reporting.*
- 2. Compliance with applicable laws and regulation.*
- 3. Effectiveness and efficiency of operation."*

Tujuan pengendalian intern ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Reliability of financial reporting.*

Manajemen memerlukan informasi yang akurat agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya pengendalian intern diharapkan dapat menyediakan data yang dapat dipercaya, sebab dengan adanya data atau catatan yang andal memungkinkan tersusunnya laporan keuangan yang andal.

2. *Compliance with applicable laws and regulation.*

Pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan segala peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan itu ditaati oleh karyawan perusahaan.

3. *Effectiveness and efficiency of operation.*

Pengendalian intern dimaksudkan untuk menghindarkan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien.

### **2.2.5. Hubungan antara Tujuan dan Komponen Pengendalian Intern**

Terdapat hubungan langsung antara tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai oleh entitas, dan komponen, yang menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, pengendalian intern adalah relevan untuk keseluruhan entitas, atau unit operasinya, atau fungsi bisnis. Meskipun pengendalian intern suatu entitas mengarah ke setiap golongan tujuan, tidak semua tujuan tersebut dan pengendalian yang bersangkutan relevan dengan audit atas laporan keuangan. Begitu juga, meskipun pengendalian intern relevan dengan keseluruhan entitas atau unit operasinya atau fungsi bisnis, pemahaman terhadap pengendalian intern yang relevan untuk setiap unit operasi dan fungsi bisnisnya mungkin tidak diperlukan.

Umumnya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

Pengendalian terhadap penjagaan aktiva dari pemerolehan, penggunaan, atau penjualan atau penghentian pemakaian yang tidak diotorisasi mungkin mencakup pengendalian yang berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan dan operasi. Dalam memperoleh pemahaman setiap komponen pengendalian intern untuk merencanakan auditnya, pertimbangan auditor terhadap pengendalian penjagaan umumnya terbatas pada yang relevan dengan keandalan pelaporan keuangan.

Pembagian pengendalian intern menjadi lima komponen menyediakan kerangka yang bermanfaat bagi auditor untuk mempertimbangkan dampak pengendalian intern entitas terhadap audit. Namun, hal ini tidak perlu

mencerminkan bagaimana suatu entitas mempertimbangkan dan mengimplementasikan pengendalian intern. Begitu juga, pertimbangan utama auditor adalah apakah pengendalian khusus berdampak asersi laporan keuangan, bukan pada penggolongannya ke dalam komponen tertentu.

Lima komponen pengendalian intern tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Komponen tersebut harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan:

- a. Ukuran entitas.
- b. Karakteristik kepemilikan dan organisasi entitas.
- c. Sifat bisnis klien.
- d. Keberagaman dan kompleksitas operasi entitas.
- e. Metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi.
- f. Penerapan persyaratan hukum dan peraturan.

#### **2.2.6. Keterbatasan Pengendalian Intern**

Dalam SA 319.6 disebutkan bahwa terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Di samping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern.

Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern, pengukuran tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh

karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.

Adat-istiadat, kultur, dan *corporate governance system* dapat mencegah terjadinya ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen, namun tidak merupakan pencegahan yang bersifat mutlak. Lingkungan pengendalian yang efektif juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakberesan semacam itu. Sebagai contoh, dewan komisaris, komite audit, dan fungsi audit intern yang efektif dapat menghalangi perbuatan yang tidak semestinya oleh manajemen. Sebagai alternatif, lingkungan pengendalian dapat mengurangi efektivitas komponen yang lain. Sebagai contoh, jika adanya insentif manajemen menciptakan lingkungan yang dapat menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan, efektivitas aktivitas pengendalian dapat dikurangi. Efektivitas pengendalian intern entitas dapat juga dipengaruhi secara negatif oleh faktor-faktor seperti perubahan dalam kepemilikan dan pengendalian, perubahan manajemen atau personel lain, atau pengembangan pasar atau industri entitas.

Sedangkan menurut Moeller *and* Witt (1999:2.56), keputusan manusia yang salah dapat menyebabkan sistem pengendalian intern gagal. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh informasi yang tersedia pada waktu yang kurang tepat, kurangnya pelatihan pegawai, kehati-hatian, dan faktor lainnya.

Ketika keputusan yang diambil ternyata salah atau terjadinya kegagalan dalam pengendalian intern, auditor seharusnya mencari data untuk memperbaiki atau memperketat pengendalian untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut.

Moeller *and* Witt (1999:2.56-2.57) memberikan beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mencegah kegagalan pengendalian intern, yaitu:

1. *Management overrides or collusion*
2. *Internal control cost versus benefits.*

Dari definisi yang dikemukakan oleh Moeller *and* Witt dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Management overrides or collusion*

Pengendalian hanya dapat efektif jika setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap operasi yang harus dilakukan. Meskipun sistem

pengendalian intern disusun dengan efektif, beberapa manajemen dengan wewenangnya dapat melanggar pengendalian tersebut.

Manajemen mampu untuk melanggar pengendalian tertentu untuk melindungi kepentingannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Misalnya manajer divisi melaporkan pendapatan yang naik untuk menutupi penurunan *market share* yang tidak dapat diantisipasi.

Banyak kasus di organisasi yang melibatkan lebih dari satu orang dalam pelanggaran ini. Manajer senior membuat laporan keuangan yang tidak benar, sedangkan pegawai di level yang lebih rendah mendukung tindakan manajer senior dengan memberikan laporan yang salah. Hal tersebut disebut kolusi. Misalnya dalam operasi penerimaan kas, pegawai yang mengurus dokumen, memindahkan kas, dan pegawai lain yang menyimpan uang tersebut dipegang oleh orang yang berbeda-beda. Jika dua pegawai tersebut bersepakat untuk menyimpan uang untuk kepentingan pribadi, maka akan sangat sulit untuk mengetahui kolusi telah terjadi di organisasi tersebut.

## 2. *Internal control cost versus benefits*

COSO menekankan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengendalian seharusnya tidak melebihi manfaat yang diterima dari pengendalian tersebut. Analisis *cost-benefit* sering menyulitkan dalam mengevaluasi pengendalian. Lebih mudah untuk menaksir biaya merancang pengendalian dibandingkan dengan menaksir manfaat yang diharapkan. Hal ini akan lebih sulit lagi jika adanya hubungan antara beberapa pengendalian dalam suatu operasi bisnis.

Dalam hal ini, COSO memberikan pedoman yang baik dengan menekankan bahwa organisasi dihadapkan pada tantangan untuk mencari keseimbangan yang tepat antara *cost-benefit*. Pengendalian yang berlebihan akan menjadi sangat mahal dan sangat tidak produktif. Auditor seharusnya menjaga keseimbangan biaya pengendalian intern dan manfaat ketika membuat rekomendasi untuk perusahaan.

Keterbatasan pengendalian intern menurut COSO (1994:80-82) adalah sebagai berikut :

1. *Judgement* (Pertimbangan)  
Keefektifan dari pengendalian dibatasi oleh kenyataan bahwa manusia memiliki kelemahan dalam membuat keputusan. Keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan.
2. *Breakdowns* (Gangguan)  
Pengendalian intern yang dirancang dengan baik, tetap dapat salah mengerti intruksi. Mereka mungkin membuat pertimbangan yang salah.
3. *Management Override* (Penolakan oleh manajemen)  
Sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif jika orang yang bertanggung jawab untuk itu berfungsi. Walaupun perusahaan memiliki pengendalian yang efektif, manajer mungkin saja menolak pengendalian intern.
4. *Collusion* (Kolusi)  
Persekongkolan antara dua atau lebih individu dapat menghasilkan gagalnya pengendalian
5. *Cost versus benefit* (Antara biaya dan manfaat)  
Dalam melakukan pengendalian intern, harus diperhatikan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Biaya tidak boleh melebihi manfaat yang akan diperoleh.”

Pengendalian intern tidak dikatakan sangat efektif, meskipun disertai kehati-hatian dalam perancangan dan implementasiannya. Hal ini disebabkan karena efektivitas pengendalian intern tergantung pada kompetensi dan manusia yang menggunakannya.

#### **2.2.7. Prosedur untuk Memperoleh Pemahaman Pengendalian Intern**

Dalam SA 319.12 dinyatakan bahwa dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian yang relevan dengan perencanaan audit, auditor harus melaksanakan prosedur untuk memberikan pengetahuan memadai tentang desain pengendalian yang relevan dengan masing-masing dari lima komponen dan apakah pengendalian tersebut dioperasikan. Pengetahuan ini biasanya diperoleh melalui pengalaman sebelumnya dengan entitas dan prosedur seperti permintaan keterangan dari manajemen, *supervisor*, dan personel staf; inspeksi terhadap dokumen dan catatan entitas; dan pengamatan atas aktivitas dan operasi entitas. Sifat dan luasnya prosedur yang dilaksanakan umumnya bervariasi dari satu

entitas ke entitas lain serta dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas tersebut, pengalaman auditor dengan entitas tersebut, sifat pengendalian khusus, dan sifat dokumentasi entitas terhadap pengendalian khusus yang semestinya.

Penaksiran auditor atas risiko bawaan dan pertimbangan tentang materialitas berbagai saldo akun dan golongan transaksi juga berdampak terhadap sifat dan luasnya prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman.

Sedangkan menurut Arens et al (2005:284-285), prosedur yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan dalam operasi diperoleh dari:

*“Update and evaluate auditor’s previous experience with the entity, Make inquiries of client personnel, Read client’s policy and systems manual, Examine documents and records. Observe entity activities and operations.”*

Dari definisi di muka, dapat diberi penjelasan sebagai berikut:

- a. *Update and evaluate auditor’s previous experience with the entity* (Memperbaharui dan mengevaluasi pengalaman auditor terdahulu dengan satuan unit usaha)

Biasanya pemeriksaan suatu perusahaan dilakukan oleh auditor yang sama, tetapi kemudian dapat diperiksa oleh auditor yang berbeda. Bila dilakukan oleh auditor yang sama, informasi mengenai pengendalian intern perusahaan dapat diperoleh dari tahun sebelumnya, karena pengendalian yang ada tidak sering berubah.

- b. *Make inquiries of client personnel* (Membuat suatu tanya jawab dengan personel dari klien)

Diperlukan sebagai bagian dari memperoleh pemahaman atas rancangan pengendalian intern.

- c. *Read client’s policy and systems manual* (Mempelajari kebijakan klien dan prosedur manual)

Perusahaan biasanya memperoleh pedoman dokumen mengenai rancangan, penerapan dan pemeliharaan pengendalian intern yang mencakup pedoman, kebijakan dan sistem perusahaan. Informasi ini

dipelajari oleh auditor dan dibicarakan dengan pegawai perusahaan untuk meyakinkan bahwa pengendalian intern telah dilaksanakan.

d. *Examine documents and records* (Memeriksa dokumen dan catatan)

Kelima komponen pengendalian intern menyangkut dokumen dan catatan. Dengan memeriksa dokumen dan catatan tersebut, auditor dapat lebih memahami dan lebih yakin bahwa pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

e. *Observe entity activities and operations* (Mengamati aktivitas dan operasi dari perusahaan)

Selain memeriksa dokumen dan catatan, auditor dapat mengamati langsung para pegawai dalam mempersiapkan dokumen dan aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, pemahaman materialitas menurut Arens et al, yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf (2003:42), adalah:

“Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional”.

Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan salah saji dalam jumlah material. Apabila auditor berpendapat adanya salah saji yang material, ia harus memberitahukan hal itu pada klien, hingga koreksi dapat dilakukan. Karena itu auditor harus memahami benar penerapan materialitas.

Dalam bukunya, Arens et al, yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf (2003:42) menyebutkan ada tiga tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat, yaitu:

1. *Amounts are immaterial* (Jumlahnya tidak material)

Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material.

2. *Amount are material but do not overshadow the financial statement as a whole* (Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan)

Ini terjadi jika salah saji dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna.

3. *Amount are so material or so pervasive that overall fairness of the statement is in question* (Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan)

Tingkat materialitas tertinggi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh suatu salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar tanpa pengecualian.

Arens et al, diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf (2003:216) juga menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan awal jumlah materialitas, yaitu:

- a. Materialitas sebagai konsep yang relatif dan bukan absolut salah saji dalam jumlah. Salah saji dalam jumlah tertentu dapat dianggap material pada sebuah perusahaan kecil tapi tidak material pada sebuah perusahaan besar.
- b. Beberapa dasar yang dibutuhkan untuk menetapkan materialitas. Karena sifatnya relatif, diperlukan basis untuk menentukan tingkat materialitas suatu salah saji.

Faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas, yaitu:

- a. Jumlah yang diakibatkan ketidakberesan biasanya dipandang lebih penting dari kekeliruan yang tidak disengaja, karena ketidakberesan mencerminkan kejujuran dan integritas manajemen atau staf.
- b. Kekeliruan yang kecil sekalipun dapat dipandang material kalau berkaitan dengan kewajiban kontrak.
- c. Kekeliruan yang tidak material dapat menjadi material kalau mempengaruhi kecenderungan laba.

#### **2.2.8. Dokumentasi Pemahaman Pengendalian Intern**

Dalam SA 319.12 dinyatakan bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat pengendalian intern entitas yang besar dan kompleks. Sebagai contoh, dokumentasi pemahaman tentang pengendalian intern entitas yang besar dan kompleks dapat mencakup bagan alir (*flowchart*), kuesioner, atau tabel keputusan. Namun, untuk entitas yang kecil, dokumentasi dalam bentuk memorandum sudah memadai. Umumnya, semakin kompleks pengendalian intern dan semakin luas prosedur yang dilaksanakan, seharusnya semakin luas dokumentasi yang dilakukan oleh auditor.

Sedangkan menurut Arens et al (2005:285-287), ada tiga metode dokumen untuk mendokumentasikan pengendalian intern yaitu:

*“Narrative, flow chart, internal control questionnaire.”*

Dari hal yang dikemukakan oleh Arens et al dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### *1. Narrative (Uraian naratif)*

Merupakan uraian tertulis mengenai pengendalian intern, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemahaman timbulnya setiap dokumen dan catatan dalam sistem.
- b. Seluruh pemrosesan yang terjadi.

- c. Penyelesaian adanya pengendalian yang relevan untuk penetapan risiko pengendalian.
- d. Indikasi adanya pengendalian yang relevan untuk penetapan risiko pengendalian.

Keuntungannya adalah bentuknya sederhana. Kekurangannya adalah sulit untuk menggambarkan rincian pengendalian intern dalam kata dan kalimat yang jelas agar tetap dapat dimengerti dan memberikan informasi yang cukup bagi analisis pengendalian dan penilaian risiko pengendalian yang efektif.

2. *Flow chart* (Bagan arus)

Bagan arus pengendalian intern adalah penggambaran dengan simbol, diagram mengenai dokumen klien dan urutan alirannya dalam organisasi. Bagan arus yang memadai hendaknya mencakup karakteristik seperti pada bentuk naratif.

Keuntungan bagan arus adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan pandangan yang tepat mengenai sistem klien.
- b. Dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dengan memberikan pemahaman yang jelas bagaimana sistem beroperasi.
- c. Lebih mudah diperbaharui daripada naratif.

3. *Internal control questionnaire* (Kuesioner pengendalian intern)

Kuesioner pengendalian intern merupakan suatu rangkaian pertanyaan mengenai pengendalian intern dalam bidang audit, termasuk lingkungan pengendalian sebagai alat bantu auditor untuk mengidentifikasi aspek-aspek pengendalian intern yang mungkin tidak memadai.

Pada umumnya, kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang cukup dijawab dengan “ya” atau “tidak”, dan setiap jawaban “tidak” menunjukkan kemungkinan adanya kelemahan dalam pengendalian daerah yang diperiksa. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah setiap daerah pemeriksaan dapat dicakup dengan lebih lengkap. Selain itu daftar pertanyaan dapat disiapkan dengan cepat pada permulaan penugasan seorang auditor. Kelemahan utama dari pendekatan ini adalah bagian dari

sistem yang diperiksa secara individual tanpa memberikan pandangan keseluruhan atas pengendalian intern yang berlaku.

Penggunaan kuesioner maupun bagan arus sangat disarankan untuk memahami sistem klien. Bagan arus memberikan pandangan mengenai sistem dan kuesioner merupakan daftar pengujian yang mengingatkan auditor mengenai berbagai pengendalian yang seharusnya ada. Jika digunakan secara tepat, kombinasi dari kedua pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang cukup memuaskan mengenai suatu sistem.

### **2.3. Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Penaksiran Risiko Pengendalian**

Dalam SA 319.1 dinyatakan bahwa setelah memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern, auditor menaksir risiko pengendalian untuk asersi yang terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor dapat menaksir pengendalian pada tingkat maksimum (probabilitas tertinggi bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dicegah atau dideteksi pada saatnya oleh pengendalian intern entitas) karena auditor yakin bahwa pengendalian tidak mungkin berkenaan dengan asersi, tidak mungkin efektif, atau karena evaluasi terhadap efektivitasnya tidak akan efisien. Sebagai alternatifnya, auditor dapat memperoleh bukti audit tentang efektivitas baik desain maupun operasi suatu pengendalian yang mendukung risiko pengendalian taksiran rendah. Bukti audit semacam itu dapat diperoleh dari pengujian pengendalian yang direncanakan atau dilaksanakan bersamaan dengan pemerolehan atau dari prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang tidak secara khusus direncanakan sebagai pengujian pengendalian.

Dalam SA 319.13 dinyatakan bila di dalam SA seksi 36 (PSA No. 07) *Bukti audit* menyatakan bahwa hampir semua pekerjaan auditor independen dalam membentuk pendapatnya atas laporan keuangan terdiri dari pemerolehan dan evaluasi bukti audit tentang asersi dalam laporan keuangan. Asersi ini terkandung

dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan dan digolongkan ke dalam lima golongan utama berikut ini:

- a. Keberadaan atau keterjadian
- b. Kelengkapan
- c. Hak dan kewajiban
- d. Penilaian atau alokasi
- e. Penyajian dan pengungkapan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, auditor mempertimbangkan asersi tersebut dalam hubungannya dengan saldo akun atau golongan transaksi tertentu.

Risiko salah saji material dalam asersi laporan keuangan terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah aji material dengan anggapan tidak terdapat pengendalian yang berkaitan. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah atau dideteksi pada saat yang tepat oleh pengendalian intern entitas. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi.

Sedangkan definisi risiko menurut Arens et al, yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf (2003:222), adalah:

“Risiko dalam auditing berarti auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit.”

Auditor menyadari, misalnya, bahwa ada ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, efektivitas struktur pengendalian intern klien, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Kebanyakan dari risiko tersebut sukar diukur dan memerlukan penanganan yang hati-hati dan seksama.

Arens et al, diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf (2003:224-226) menyebutkan ada beberapa model risiko audit yang digunakan untuk tahap perencanaan dalam menentukan berapa besar bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam tiap siklus, yaitu:

1. Risiko Penemuan yang Direncanakan

Risiko penemuan yang direncanakan adalah bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi, kalau salah saji semacam itu timbul. Ada dua hal yang penting mengenai risiko penemuan yang direncanakan di atas:

- a. Tergantung pada tiga unsur risiko lain dalam model. Risiko penemuan yang direncanakan hanya akan berubah kalau auditor mengubah salah satu unsur lainnya.
- b. Risiko penemuan yang direncanakan menentukan besarnya rencana bahan bukti yang akan dikumpulkan, dalam hubungan yang berlawanan. Kalau nilai risiko penemuan yang direncanakan diperkecil, auditor harus mengumpulkan bahan bukti yang lebih banyak dalam audit

2. Risiko Bawaan

Risiko bawaan adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Risiko bawaan adalah faktor kerentanan laporan keuangan terhadap salah saji material, dengan asumsi tidak ada pengendalian intern. Faktor pengendalian intern tidak diperhitungkan dalam risiko bawaan karena dalam model risiko audit hal itu akan diperhitungkan tersendiri sebagai risiko pengendalian.

Hubungan risiko bawaan dengan risiko penemuan serta rencana pengumpulan bahan bukti adalah bahwa risiko bawaan sifatnya adalah berbanding terbalik dengan risiko penemuan, dan berbanding lurus dengan bahan bukti.

### 3. Risiko Pengendalian

Risiko pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan (salah saji) dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Risiko pengendalian mengandung unsur; (1) penetapan apakah sruktur pengendalian intern klien cukup efektif untuk mendeteksi atau mencegah kekeliruan; dan (2) keinginan auditor untuk membuat penetapan tersebut di bawah nilai maksimum (100%) dalam rencana audit.

### 4. Risiko Audit yang Dapat Diterima

Risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diterima. Risiko ini ditetapkan secara subjektif bahwa auditor bersedia menerima laporan keuangan tidak disajikan secara wajar setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan.

#### **2.3.1. Konsep Dasar yang Mendasari Penilaian atas Struktur Pengendalian Intern dan Penetapan Risiko Pengendalian**

Menurut Arens et al (2005:270), ada tiga konsep yang mendasari penilaian atas struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian, yaitu:

1. *Management's responsibility.*
2. *Reasonable assurance.*
3. *Inherent limitations internal.*

Dari hal yang dikemukakan oleh Arens et al, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Management's responsibility* (Tanggung jawab manajemen).

Manajemen bukan auditor, yang harus menetapkan dan melakukan pengendalian satuan usaha tersebut. Konsep ini konsisten dengan pernyataan bahwa manajemen, bukan auditor, yang bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. *Reasonable assurance* (Keyakinan memadai).

Perusahaan seharusnya mengembangkan struktur pengendalian intern yang memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan absolut bahwa laporan keuangan dinyatakan wajar. Pengendalian intern dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan biaya dan manfaat pengendalian tersebut.

3. *Inherent limitations internal* (Keterbatasan bawaan).

Struktur pengendalian intern tidak dapat dikatakan sangat efektif, meskipun disertai kehati-hatian dalam perancangan dan implementasinya. Bahkan, meskipun pegawai sistem dapat merancang sistem yang ideal, efektivitasnya tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang yang menggunakannya.

### **2.3.2. Penaksiran Risiko Pengendalian**

Dalam SA 319.13 dinyatakan bahwa penaksiran risiko pengendalian adalah proses evaluasi suatu pengendalian intern entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko pengendalian harus ditaksir menurut asersi laporan keuangan. Setelah memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor dapat melakukan penaksiran risiko pengendalian pada tingkat maksimum untuk beberapa atau semua asersi karena ia yakin bahwa pengendalian tidak berkaitan dengan suatu asersi, kemungkinan tidak efektif, atau karena evaluasi terhadap efektivitasnya akan tidak efisien.

Penaksiran pengendalian intern di bawah tingkat maksimum mencakup:

- a. Pengidentifikasian pengendalian khusus yang relevan dengan asersi khusus yang kemungkinan mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tersebut.
- b. Pelaksanaan pengujian pengendalian untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian tersebut.

Risiko pengendalian dapat ditaksir dalam bentuk kuantitatif, seperti persentase, atau dalam bentuk nonkuantitatif yang berkisar antara maksimum dan minimum. Istilah tingkat maksimum digunakan dalam seksi ini dengan makna probabilitas terbesar bahwa salah saji material yang dapat terjadi dalam asersi laporan keuangan tidak akan dicegah atau dideteksi pada waktu yang tepat oleh pengendalian intern entitas.

### **2.3.3. Pengidentifikasian Pengendalian Khusus**

Dalam SA 319.14 dinyatakan bahwa dalam mengidentifikasi pengendalian yang relevan dengan asersi laporan keuangan tertentu, auditor harus mempertimbangkan bahwa pengendalian dapat mempunyai dampak pervasif ke banyak asersi atau berdampak khusus ke asersi secara individual, tergantung dari sifat komponen pengendalian tertentu yang terkait.

Pengendalian dapat bersifat langsung atau tidak langsung berkaitan dengan asersi. Semakin tidak langsung hubungan tersebut, semakin kurang efektif pengendalian tersebut dalam mengurangi risiko pengendalian untuk asersi tersebut.

### **2.3.4. Pengujian Pengendalian (*Test of Control*)**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.14), pengujian pengendalian didefinisikan sebagai berikut

“Prosedur yang diarahkan terhadap baik efektivitas desain maupun operasi pengendalian.”

Dari hal yang dikemukakan di muka, dapat dijelaskan bahwa:

Pengujian pengendalian yang diarahkan terhadap efektivitas desain pengendalian berkaitan dengan apakah pengendalian tersebut didesain sesuai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi laporan keuangan tertentu. Pengujian untuk mendapatkan bukti audit seperti itu biasanya meliputi prosedur permintaan keterangan dari pegawai entitas yang semestinya, inspeksi dokumen dan laporan, serta pengamatan terhadap penerapan

pengendalian tertentu. Untuk entitas yang pengendalian internnya kompleks, auditor harus mempertimbangkan penggunaan bagan alir (*flowchart*), kuesioner, atau tabel keputusan yang memudahkan penerapan pengujian atas desain.

Pengujian pengendalian yang diarahkan terhadap efektivitas operasi pengendalian bersangkutan dengan bagaimana penerapan pengendalian, konsistensi penerapannya selama periode audit dan siapa yang menerapkannya. Pengujian ini biasanya mencakup prosedur permintaan keterangan dari pegawai yang semestinya; inspeksi atas dokumen, laporan, atau *electronic file* yang menggambarkan kinerja pengendalian; pengamatan terhadap penerapan pengendalian oleh auditor. Dalam beberapa hal, prosedur tertentu mungkin dapat sekaligus menentukan efektivitas desain dan operasi. Namun, mungkin diperlukan gabungan prosedur untuk mengevaluasi efektivitas desain atau operasi suatu pengendalian.

Sedangkan menurut Arens et al, pengujian pengendalian merupakan suatu prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam pencegahan atau menemukan salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan, sehingga dapat menentukan apakah tingkat risiko pengendalian dapat dikurangi.

Jika hasil pengujian pengendalian mendukung rancangan kebijakan dan prosedur sebagaimana yang diharapkan, auditor akan menggunakan risiko pengendalian yang lebih rendah. Jika tidak mendukung, penetapan risiko pengendalian yang lebih tinggi akan digunakan, kecuali pengendalian tambahan untuk tujuan pemeriksaan yang berkaitan dengan transaksi yang dapat diidentifikasi dan terbukti efektif.

Ada empat prosedur dalam pengujian pengendalian intern menurut Arens et al (2005:293) yaitu:

1. *Make inquiries of appropriate client personnel*
2. *Examine documents, records, and reports*
3. *Observe Control-related activities*
4. *Reperform client procedures”.*

Ruang lingkup pengujian tergantung pada risiko pengendalian yang ditentukan auditor. Apabila risiko pengendalian rendah, pengujian dapat dilakukan secara luas, baik jumlah pengendalian yang diuji maupun luas pengujian untuk tiap pengendalian.

### **2.3.5. Tingkat Risiko Pengendalian Taksiran**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.15), tingkat risiko pengendalian taksiran didefinisikan sebagai:

“Kesimpulan yang dicapai dari hasil penaksiran risiko pengendalian”

Untuk menetapkan bukti audit yang diperlukan untuk mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran dibawah tingkat maksimum, auditor harus mempertimbangkan karakteristik bukti audit tentang risiko pengendalian. Namun, pada umumnya, semakin rendah tingkat risiko pengendalian taksiran, semakin tinggi keyakinan yang harus diberikan oleh bukti audit bahwa pengendalian yang relevan dengan sesuatu asersi telah didesain dan dioperasikan secara efektif.

Auditor menggunakan tingkat risiko pengendalian taksiran (bersama dengan tingkat risiko bawaan taksiran) untuk menetapkan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk asersi yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor menggunakan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk menetapkan sifat, saat dan lingkup prosedur audit yang digunakan untuk menemukan salah saji material dalam asersi laporan keuangan.

### **2.3.6. Pengujian Substantif**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.15), pengujian substantif didefinisikan sebagai:

“Prosedur audit yang didesain untuk menemukan salah saji material dalam asersi laporan keuangan”

Menurunnya tingkat risiko deteksi yang dapat diterima menyebabkan meningkatnya keyakinan yang diperoleh dari pengujian substantif. Oleh sebab itu, auditor dapat melaksanakan satu atau lebih hal berikut:

- a. Mengubah sifat pengujian substantif dari prosedur yang kurang efektif menjadi efektif, seperti melakukan pengujian yang diarahkan kepada pihak yang independen di luar entitas; bukan pengujian yang diarahkan kepada pihak atau dokumentasi intern.
- b. Mengubah saat pengujian substantif, seperti melakukan pengujian pada akhir tahun; bukan pada tanggal interim.
- c. Mengubah lingkup pengujian substantif, dengan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar.

#### **2.3.7. Pendokumentasian Tingkat Risiko Pengendalian Taksiran**

Sebagai tambahan atas pendokumentasian pemahaman pengendalian intern, auditor harus mendokumentasikan dasar kesimpulannya tentang tingkat risiko pengendalian taksiran. Kesimpulan mengenai tingkat risiko pengendalian taksiran mungkin berbeda apabila dihubungkan dengan berbagai saldo akun atau golongan transaksi. Namun, untuk asersi laporan keuangan yang risiko pengendaliannya ditaksir pada tingkat maksimum, auditor harus mendokumentasikan kesimpulannya bahwa pengendalian adalah pada tingkat maksimum, tetapi tidak perlu mendokumentasikan dasar kesimpulannya. Untuk asersi lainnya, yang tingkat risiko pengendalian taksirannya berada di bawah tingkat maksimum, auditor harus mendokumentasikan dasar kesimpulannya, bahwa efektivitas desain dan operasi pengendalian intern mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran yang dipakai, sifat pengendalian intern entitas, dan sifat dokumentasi entitas mengenai pengendalian internnya.

#### **2.4. Hubungan Pemahaman dengan Penaksiran Risiko Pengendalian**

Dalam SA 319.16 dinyatakan bahwa walaupun pemahaman struktur pengendalian intern dan penaksiran risiko dibahas terpisah dalam melakukan audit, keduanya dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Tujuan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian intern adalah agar auditor memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk perencanaan audit. Tujuan pengujian pengendalian adalah agar auditor memperoleh bukti audit yang dipakai dalam menaksir risiko pengendalian. Namun, prosedur yang dilaksanakan untuk mencapai satu tujuan, dapat juga menyangkut tujuan yang lain.

Berdasarkan tingkat risiko pengendalian taksiran, yang diharapkan oleh auditor untuk mendukung pertimbangan efisiensi audit, auditor sering merencanakan pelaksanaan beberapa pengujian pengendalian bersama dengan pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Di samping itu, walaupun beberapa prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman mungkin tidak secara khusus direncanakan sebagai pengujian pengendalian, prosedur tersebut dapat memberikan bukti tentang efektivitas, baik mengenai desain maupun operasi pengendalian yang relevan dengan asersi tertentu, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai pengujian pengendalian.

Apabila auditor berkesimpulan bahwa prosedur yang dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman pengendalian intern juga memberikan bukti audit untuk menaksir risiko pengendalian, maka ia harus mempertimbangkan bukti yang mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran, tipe bukti audit, sumber bukti audit, ketepatan waktu bukti audit, serta keterkaitan bukti audit dalam menilai tingkat keyakinan yang diberikan oleh bukti audit tersebut. Walaupun bukti audit demikian mungkin tidak dapat memberikan keyakinan memadai untuk mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran di bawah maksimum, namun untuk asersi lainnya mungkin sudah cukup, sehingga dapat menjadi dasar bagi auditor untuk mengubah sifat, saat, dan lingkup pengujian substantif yang telah direncanakan untuk asersi tersebut. Namun, prosedur seperti itu tidak cukup untuk mendukung suatu tingkat risiko pengendalian taksiran di bawah tingkat maksimum, apabila prosedur tersebut tidak dapat memberikan bukti audit

memadai untuk mengevaluasi efektivitas, baik mengenai desain maupun operasi pengendalian yang relevan dengan sesuatu asersi.

## **2.5. Pengurangan Lebih Lanjut Tingkat Risiko Pengendalian Taksiran**

Dalam SA 319.2 dinyatakan bahwa, setelah memperoleh pemahaman dan menaksir risiko pengendalian, auditor dapat mencari pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran untuk asersi tertentu. Dalam hal seperti ini, auditor mempertimbangkan apakah bukti audit yang cukup untuk mendukung pengurangan lebih lanjut mungkin tersedia dan apakah pelaksanaan pengujian pengendalian tambahan untuk memperoleh bukti audit tersebut akan efisien. Auditor menggunakan pengetahuan yang dihasilkan dari pemahaman atas pengendalian intern dan tingkat risiko pengendalian taksiran dalam menentukan sifat, saat, dan luas pengujian substantif untuk asersi laporan keuangan.

Dalam SA 319.17 dijelaskan bahwa setelah memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern dan menaksir risiko pengendalian, auditor mungkin ingin memperoleh pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran untuk asersi tertentu. Dalam hal ini, auditor mempertimbangkan apakah tambahan bukti audit telah cukup tersedia untuk mendukung pengurangan lebih lanjut dan apakah akan efisien untuk melaksanakan pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti audit tersebut. Hasil prosedur yang dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman pengendalian intern serta informasi yang berkaitan dari sumber lain, membantu auditor dalam mengevaluasi kedua faktor tersebut.

Dalam mempertimbangkan efisiensi, auditor menyadari bahwa bukti audit tambahan untuk mendukung pengurangan tingkat risiko pengendalian taksiran untuk suatu asersi, akan mengakibatkan berkurangnya usaha audit untuk pengujian substantif atas asersi tersebut. Auditor mempertimbangkan bertambahnya usaha audit dalam hubungannya dengan tambahan pengujian pengendalian yang diperlukan untuk mendapatkan bukti audit tersebut dengan berkurangnya usaha audit yang berhubungan dengan pengurangan pengujian substantif. Apabila auditor berkesimpulan bahwa tidak efisien untuk mendapatkan bukti audit tambahan untuk asersi tertentu, maka ia menggunakan tingkat risiko

pengendalian taksiran berdasarkan pemahaman atas pengendalian intern dalam merancang pengujian substantif untuk asersi tersebut.

Untuk asersi yang auditor melakukan tambahan pengujian pengendalian, ia menentukan tingkat risiko pengendalian taksiran, yang didukung oleh hasil pengujian tersebut. Tingkat risiko pengendalian taksiran digunakan dalam menentukan risiko deteksi yang tepat untuk menerima asersi tersebut, dan oleh karenanya dipakai pula untuk menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian substantif bagi asersi tersebut.

### **2.5.1. Bukti yang Mendukung Tingkat Risiko Pengendalian Taksiran**

Dalam SA 319.18 dinyatakan bahwa apabila auditor menaksir risiko pengendalian di bawah tingkatan maksimum, ia harus memperoleh bukti audit yang cukup untuk mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran tersebut. Bukti audit yang cukup untuk mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran merupakan masalah pertimbangan auditor. Bukti audit sangat bervariasi dalam memberikan keyakinan kepada auditor pada waktu ia mengembangkan tingkat risiko pengendalian taksiran. Tipe bukti, sumber, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti lain yang berhubungan dengan kesimpulan yang dituju, semuanya mempengaruhi tingkat keyakinan yang dapat diberikan oleh bukti audit. Karakteristik tersebut mempengaruhi sifat, saat dan luasnya pengujian atas pengendalian yang diterapkan oleh auditor untuk mendapatkan bukti audit mengenai risiko pengendalian. Auditor memilih cara pengujian dari berbagai teknik yang ada, seperti permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pelaksanaan ulang pengendalian yang berkaitan dengan suatu asersi. Tidak ada satupun pengujian pengendalian tertentu yang selalu diperlukan, dapat diterapkan, atau selalu efektif untuk setiap keadaan.

### **2.5.2. Tipe Bukti Audit**

Dalam SA 319.18 dinyatakan bahwa sifat pengendalian tertentu yang berkaitan dengan suatu asersi mempengaruhi tipe bukti audit yang tersedia untuk mengevaluasi efektivitas desain atau operasi pengendalian tersebut. Untuk beberapa pengendalian, dokumentasi desain atau operasinya mungkin ada. Dalam hal tersebut, auditor dapat memutuskan untuk melakukan inspeksi terhadap dokumentasi untuk mendapatkan bukti audit tentang efektivitas desain atau operasinya.

Namun, untuk pengendalian lain, dokumentasi demikian mungkin tidak tersedia atau tidak relevan. Misalnya, dokumentasi mengenai desain atau operasi mungkin tidak ada untuk beberapa faktor lingkungan pengendalian, seperti penetapan wewenang dan tanggung jawab, atau untuk beberapa tipe aktivitas pengendalian, seperti mengenai pemisahan tugas atau beberapa aktivitas pengendalian yang dilakukan dengan komputer. Dalam keadaan ini, bukti audit mengenai efektivitas desain atau operasi dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan atau dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk melaksanakan ulang pengendalian yang relevan.

### **2.5.3. Sumber Bukti Audit**

Dalam SA 319.19 dinyatakan bahwa pada umumnya, bukti audit mengenai efektivitas desain dan operasi pengendalian yang diperoleh langsung oleh auditor, misalnya dengan jalan pengamatan, memberikan keyakinan yang lebih besar daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan mengambil kesimpulan, misalnya dari permintaan keterangan. Sebagai contoh, bukti audit mengenai pemisahan fungsi yang semestinya, yang diperoleh auditor dengan pengamatan langsung secara pribadi atas orang yang menerapkan prosedur pengendalian, biasanya memberikan keyakinan lebih besar daripada yang diperoleh melalui permintaan keterangan tentang orang tersebut. Namun, auditor harus mempertimbangkan, bahwa penerapan pengendalian yang diamati, mungkin tidak dilaksanakan dengan cara yang sama, jika auditor tidak hadir.

Dengan jalan meminta keterangan saja, pada umumnya tidak memberikan bukti audit yang cukup untuk mendukung kesimpulan tentang efektivitas desain dan operasi pengendalian tertentu. Apabila auditor menentukan bahwa prosedur pengendalian atas asersi tertentu dapat berpengaruh signifikan dalam mengurangi risiko pengendalian pada tingkat yang lebih rendah, biasanya ia perlu melakukan pengujian tambahan untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dalam mendukung kesimpulan mengenai efektivitas desain dan operasi pengendalian tersebut.

#### **2.5.4. Ketepatan Bukti Audit**

Dalam SA 319.19 dinyatakan bahwa ketepatan waktu bukti audit berkaitan dengan kapan bukti itu diperoleh dan hubungannya dengan bagian dari masa audit yang bersangkutan. Dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang diberikan oleh suatu bukti, auditor harus memperhatikan bahwa bukti audit yang diperoleh dengan beberapa pengujian atas pengendalian, misalnya dengan pengamatan, hanya tepat untuk waktu tertentu, pada saat prosedur tersebut diterapkan oleh auditor. Sebagai akibatnya, bukti audit tersebut mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian untuk masa yang tidak termasuk dalam pengujian tersebut. Dalam hal demikian, auditor mungkin memutuskan untuk menambah pengujian dengan pengujian atas pengendalian lainnya, untuk dapat memberikan bukti audit untuk seluruh masa yang diaudit.

Bukti audit tentang efektivitas desain dan operasi pengendalian yang diperoleh pada audit sebelumnya, dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menaksir risiko pengendalian untuk tahun sekarang. Dalam mengevaluasi penggunaan bukti audit seperti itu untuk masa sekarang, auditor harus mempertimbangkan pentingnya asersi yang bersangkutan, pengendalian tertentu yang dievaluasi dalam masa audit sebelumnya, tingkat efektivitas desain dan operasi pengendalian tersebut yang dievaluasi, hasil pengujian atas pengendalian yang digunakan dalam melakukan evaluasi, dan bukti audit mengenai desain dan operasi yang mungkin diperoleh dari pengujian substantif yang dilakukan dalam audit sekarang. Auditor juga harus memperhatikan bahwa semakin lama waktu

berlalu sejak pelaksanaan pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti audit mengenai risiko pengendalian, semakin kurang keyakinan yang dapat diberikannya.

Pada waktu mempertimbangkan bukti audit yang diperoleh dari audit sebelumnya, auditor harus mendapatkan bukti audit dari bukti sekarang mengenai apakah telah terjadi perubahan dalam pengendalian intern, termasuk perubahan kebijakan, prosedur dan personel, setelah audit yang lalu. Pertimbangan bukti audit mengenai perubahan tersebut, bersama-sama dengan pertimbangan pentingnya asersi yang bersangkutan, mendukung penambahan atau pengurangan bukti audit tambahan yang harus dikumpulkan dalam audit sekarang mengenai efektivitas desain dan operasi yang harus diperoleh dalam periode sekarang.

Pada waktu auditor memperoleh bukti audit mengenai desain dan operasi pengendalian selama masa interim, ia harus menentukan bukti audit tambahan apa yang harus diperoleh untuk masa yang tersisa. Dalam membuat keputusan tersebut, auditor harus mempertimbangkan pentingnya asersi yang bersangkutan, pengendalian khusus yang dievaluasi selama masa interim, tingkat efektivitas desain dan operasi pengendalian yang dievaluasi tersebut, hasil pengujian pengendalian yang digunakan dalam membuat evaluasi tersebut, lamanya waktu yang masih tersisa dan bukti audit mengenai desain dan operasi yang mungkin diperoleh dari pengujian substantif yang dilakukan dalam masa yang tersisa. Auditor harus mendapatkan bukti audit tentang sifat dan lingkup perubahan yang signifikan dalam pengendalian intern, termasuk perubahan kebijakan, prosedur dan personel, yang terjadi setelah masa interim.

#### **2.5.5. Keterkaitan Bukti Audit**

Dalam SA 319.21 dinyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan pengaruh gabungan dari berbagai tipe bukti audit yang ada kaitannya dengan suatu asersi dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang diberikan oleh bukti audit. Dalam beberapa hal, satu tipe bukti audit saja mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian. Untuk mendapatkan

bukti audit memadai, auditor dapat melakukan pengujian pengendalian yang berkaitan dengan pengendalian tersebut.

Di samping itu, dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang diberikan oleh bukti audit, auditor harus mempertimbangkan keterkaitan lingkungan pengendalian perusahaan, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Walaupun salah satu komponen pengendalian intern mungkin mempengaruhi sifat, saat, dan lingkup pengujian substantif untuk asersi laporan keuangan tertentu, auditor harus mempertimbangkan bukti audit untuk masing-masing komponen dalam hubungannya dengan bukti audit mengenai komponen lainnya dalam mempertimbangkan risiko pengendalian untuk asersi tertentu.

Pada umumnya, apabila berbagai tipe bukti audit mendukung kesimpulan yang sama mengenai desain dan operasi pengendalian, tingkat keyakinan yang diberikan oleh bukti audit tersebut akan meningkat. Sebaliknya, apabila berbagai tipe bukti audit mengakibatkan kesimpulan yang berbeda mengenai desain dan operasi pengendalian keyakinan yang diberikan oleh bukti audit tersebut akan berkurang. Misalnya, berdasarkan bukti audit bahwa lingkungan pengendalian adalah efektif, auditor mungkin mengurangi jumlah lokasi penerapan prosedur audit. Namun, apabila dalam mengevaluasi prosedur pengendalian tertentu, auditor mendapatkan bukti audit bahwa prosedur pengendalian tersebut tidak efektif, ia mungkin mengevaluasi ulang kesimpulan mengenai lingkungan pengendalian antara lain dengan menerapkan prosedur audit pada lokasi tambahan.

Demikian pula, bukti audit yang menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian tidak efektif dapat berdampak negatif terhadap komponen yang tadinya efektif untuk asersi tertentu. Misalnya, lingkungan pengendalian yang tampaknya memungkinkan perubahan yang tidak diotorisasi dalam program komputer dapat mengurangi keyakinan yang diberikan oleh bukti audit yang diperoleh dari evaluasi atas efektivitas program pada suatu waktu tertentu. Dalam hal ini, auditor dapat memutuskan untuk mendapatkan bukti audit tambahan mengenai desain dan operasi program tersebut selama masa yang diaudit.

Misalnya, auditor mungkin meminta dan mengawasi satu *copy* program dan mempergunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membandingkan *copy* tersebut dengan program yang dipakai perusahaan untuk memproses data.

Audit atas laporan keuangan adalah suatu proses kumulatif; ketika auditor menaksir risiko pengendalian, informasi yang diperoleh mungkin menyebabkan ia mengubah sifat, saat, dan lingkup pengujian pengendalian lain yang sudah direncanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Di samping itu, mungkin ada informasi yang masuk ke dalam perhatian auditor sebagai hasil pelaksanaan pengujian substantif atau dari sumber lain selama melakukan audit, yang sangat berbeda dengan informasi yang dijadikan dasar untuk perencanaan pengujian pengendalian dalam menaksir risiko pengendalian. Sebagai contoh, luasnya salah saji yang ditemukan auditor ketika melakukan pengujian substantif, mungkin mengubah pertimbangannya mengenai tingkat risiko pengendalian taksiran. Dalam hal ini, auditor mungkin perlu mengevaluasi ulang prosedur substantif yang direncanakan, yang berdasarkan atas pertimbangan baru mengenai tingkat risiko pengendalian taksiran untuk seluruh atau sebagian asersi laporan keuangan.

## **2.6. Hubungan antara Risiko Pengendalian dengan Risiko Deteksi**

Dalam SA 319.22 dinyatakan bahwa tujuan akhir penaksiran risiko pengendalian adalah membantu auditor dalam mengevaluasi risiko adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Proses penaksiran risiko pengendalian (bersama-sama dengan penaksiran risiko bawaan) memberikan bukti audit mengenai risiko salah saji yang mungkin ada dalam laporan keuangan. Auditor menggunakan bukti ini sebagai bagian dari dasar memadai untuk memberikan suatu pendapat, yang berpedoman atas standar pekerjaan lapangan yang ke tiga, yang berbunyi:

“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.”

Setelah mempertimbangkan tingkat yang ditaksir sebagai batas risiko salah saji material dalam laporan keuangan dan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran, auditor melakukan pengujian substantif untuk membatasi risiko deteksi yang dapat diterima. Apabila tingkat risiko pengendalian yang diperhitungkan turun, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima naik. Oleh karena itu, auditor mungkin mengubah sifat, saat, dan lingkup pengujian substantif yang dilaksanakan.

Walaupun hubungan terbalik antara risiko pengendalian dan risiko deteksi memungkinkan auditor mengubah sifat atau saat pengujian substantif, atau membatasi luasnya pengujian tersebut, biasanya penaksiran tingkat risiko pengendalian tidak boleh terlampaui rendah, sampai menghilangkan perlunya auditor melakukan pengujian substantif untuk membatasi risiko deteksi atas semua asersi yang relevan dengan saldo akun atau golongan transaksi yang signifikan. Oleh karena itu, terlepas dari besarnya tingkat risiko pengendalian taksiran, auditor harus melakukan pengujian atas saldo akun atau golongan transaksi yang signifikan.

Pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor terdiri dari pengujian rinci atas transaksi dan saldonya, serta prosedur analitik. Dalam menaksir risiko pengendalian, auditor juga dapat menggunakan pengujian rinci atas transaksi yang dilakukan sebagai pengujian pengendalian. Tujuan pengujian rinci atas transaksi yang dilakukan sebagai pengujian substantif adalah untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Tujuan pengujian rinci atas transaksi yang dilakukan sebagai pengujian pengendalian adalah untuk mengevaluasi apakah pengendalian beroperasi secara efektif. Walaupun tujuan ini berbeda, keduanya dapat dicapai secara bersama dengan melakukan pengujian rinci atas transaksi yang sama. Namun, auditor harus menyadari bahwa pertimbangan yang seksama harus ditujukan terhadap desain dan evaluasi atas pengujian yang dilakukan, untuk memastikan bahwa kedua tujuan tersebut akan tercapai.

## 2.7. Pemanfaatan Penilaian Pengendalian Intern dalam Menentukan Luas Pemeriksaan

Menurut Mulyadi (2002:196), hasil studi dan pengujian efektivitas pengendalian intern dalam menentukan luasnya pemeriksaan dapat bermanfaat sebagai:

1. Pemilihan prosedur audit yang akan digunakan dalam audit.
2. Pemilihan saat penerapan prosedur audit tersebut, yaitu apakah diterapkan sebelum tanggal laporan keuangan atau sesudahnya.
3. Penentuan jumlah pengujian (*test*) yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya.”

## 2.8. Konsep Pengakuan Pendapatan dan Beban

Masalah pengakuan pendapatan merupakan salah satu masalah yang cukup pelik yang dihadapi oleh profesi di bidang akuntansi. Walaupun kita telah mempunyai patokan umum mengenai pengakuan pendapatan ini, tapi karena kaitannya dengan berbagai macam faktor, sangatlah sulit bagi para ahli untuk mengembangkan suatu patokan yang bisa diterapkan pada semua situasi dan kondisi. Usaha mencari jawaban atas pertanyaan “*When sale is a sale*” masih tetap merupakan masalah yang terus berlangsung.

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, sewa. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004: 23.1), pengakuan pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. “

Pernyataan dimuka mengidentifikasi keadaan yang memenuhi kriteria tersebut agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan pedoman praktis dalam penerapan kriteria tersebut.

Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa berikut ini:

- a. Penjualan barang
- b. Penjualan jasa
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen.

Pernyataan dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode. Beberapa kontrak penjualan jasa yang timbul dari kontrak konstruksi.

Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:

- a. Bunga-pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan.
- b. Royalti-pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya, paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer.
- c. Dividen-distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004: 23.1), pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004: 23.1), nilai wajar didefinisikan sebagai berikut:

“Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).”

PSAK 23.3 menyatakan bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karenanya bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.

## **2.9. Penjualan dan Piutang**

Kegiatan penjualan dan piutang merupakan kegiatan yang penting bagi suatu perusahaan yang berorientasi pada laba, karena melalui kegiatan ini perusahaan akan memperoleh laba atau rugi setelah pendapatan dikurangi biaya.

Kegiatan penjualan terdiri dari penjualan barang dan jasa, baik secara tunai maupun kredit. Pendapatan yang diperoleh melalui penjualan akan menjamin berlangsungnya aktivitas perusahaan lainnya. Oleh karena itu siklus penjualan merupakan salah satu siklus yang penting dalam suatu perusahaan karena dari siklus ini diperoleh pendapatan yang menentukan keuntungan bagi perusahaan.

Dari kegiatan penjualan yang dilakukan secara kredit maka akan timbul piutang yang merupakan klaim perusahaan dalam bentuk uang, klaim ini yang kemudian diklasifikasikan sebagai piutang usaha dan wesel tagih.

### 2.9.1. Pengertian Penjualan dan Piutang

Penjualan adalah tindak lanjut dari pemasaran dan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pengertian penjualan yang dikemukakan oleh Guritno (1992:350) adalah sebagai berikut:

“Penjualan adalah perbuatan atau hal menjual, khususnya berupa pengalihan kepemilikan dan hak atas suatu milik (*property*) dari seseorang kepada orang lain dengan kategori tertentu.”

Berbagai transaksi penjualan dapat diklasifikasikan menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:170) sebagai berikut:

1. Penjualan secara tunai yaitu penjualan yang bersifat *cash and carry* pada umumnya terjadi secara kontan. Dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan juga dianggap kontan.
2. Penjualan secara kredit yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan.
3. Penjualan secara tender yaitu penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Untuk memenangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan tender (*bid bond*) dan lain-lain, juga harus dapat bersaing dengan pihak lainnya.
4. Penjualan ekspor yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang mengimpor barang tersebut. Biasanya penjualan ekspor memanfaatkan prosedur *letter of credit (L/C)*.
5. Penjualan secara konsinyasi yaitu menjual barang secara “titipan” kepada pembeli yang juga sebagai penjual. Apabila barang tersebut tidak laku, maka akan kembali ke penjual.
6. Penjualan melalui grosir yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang antara. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pabrik atau importir dengan pedagang atau toko eceran.”

Penjualan yang dilakukan secara kredit akan menimbulkan piutang. Menurut Warren et al (2002:314) yang dimaksud dengan piutang adalah:

*“The term receivables includes all claims against other entities, including people, business firms, and other organizations”.*

Berbagai transaksi piutang menurut Warren et al yang dialihbahasakan oleh Farahmita dkk (2005:392) dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Piutang usaha (*Account receivable*)
2. Wesel Tagih (*Notes receivable*)
3. Piutang lain-lain (*Other receivable*)”

### **2.9.2. Transaksi Penjualan dan Piutang**

Menurut Basu Swastha dan Irawan (2000:404), bagi Perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam penjualannya, yaitu:

1. Mencapai volume penjualan tertentu.
2. Mendapatkan laba tertentu.
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:171), bagian penjualan memegang peranan penting, yaitu:

1. Mencari order sesuai dengan tingkat penjualan menguntungkan.
2. Mencatat pesanan-pesanan (*order*) yang diterima.
3. Mengeluarkan dokumen perintah mengeluarkan barang (*delivery order*) dan mengawasi pengiriman.
4. Mencatat akibat-akibat materil dan finansial dari aktivitas penjualan.
5. Membuat faktur penjualan.
6. Menyusun data statistik penjualan.
7. Menyusun laporan penjualan.”

Selain itu bagian penjualan juga dituntut untuk meningkatkan volume penjualan, hal ini memaksa pimpinan untuk lebih seksama dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam bidang penjualan.

### 2.9.3. Fungsi dan Dokumen Penjualan dan Piutang

Menurut Arens et al (2005:406-409), fungsi bisnis dan dokumen yang terdapat di dalam siklus penjualan dan penagihan piutang adalah sebagai berikut:

*“Processing customer order, granting credit, shipping goods, billing customer and recording sales, processing and recording cash receipt, processing and recording sales return and allowances, charging of uncollectible account receivable, and providing for bad debts.”*

#### 1. *Processing Customer order* (Pemrosesan pesanan pelanggan)

Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan siklus penjualan. Penerimaan order pelanggan menghasilkan order penjualan. Dokumentasi yang digunakan:

- a. Order pelanggan (*Customer order*) adalah permintaan barang dagang oleh pelanggan.
- b. Order penjualan (*Sales order*) adalah dokumen untuk mencatat deskripsi, jumlah, dan informasi terkait untuk barang yang dipesan oleh pelanggan.

#### 2. *Granting credit* (Persetujuan penjualan kredit)

Untuk penjualan kredit, sebelum barang dikirimkan perlu mendapat persetujuan dahulu dari pejabat yang berwenang. Praktik yang lemah dalam persetujuan penjualan secara kredit seringkali menyebabkan besarnya piutang tak tertagih cukup besar dan piutang usaha menjadi tidak tertagih.

#### 3. *Shipping goods* (Pengiriman barang)

Merupakan titik kritis karena pada saat ini aktiva perusahaan diserahkan dan juga merupakan titik awal dalam siklus penjualan apabila perusahaan mengakui penjualan pada saat barang dikirimkan. Dokumen yang digunakan adalah *shipping document* (dokumen pengiriman barang), yaitu dokumen yang disiapkan untuk mengotorisasi pengiriman barang. Dokumen ini mencatat deskripsi barang yang dikirim, jumlah yang dikirim, dan data lain yang relevan. Salah satu jenis dokumen ini adalah *bill of lading* yaitu kontrak tertulis antara perusahaan dengan penjual atas penerimaan dan pengiriman barang. Dokumen asli untuk pelanggan dan

duplikatnya disimpan sebagai informasi barang yang dikirim kepada pembeli dan juga untuk menagih ke pembeli (dilampirkan pada surat tagih bila akan menagih ke *customer*).

4. *Billing customer and recording sales* (Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan)

Penagihan ke pelanggan mengenai jumlah yang terutang harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Dokumen dan catatan yang digunakan:

- a. Faktur penjualan (*Sales invoice*) adalah dokumen yang menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang yang dijual, harga termasuk ongkos angkut, asuransi, syarat pembayaran, dan data lain yang relevan.
- b. Jurnal penjualan (*Sales journal*) adalah jurnal yang mencatat transaksi penjualan.
- c. Laporan ikhtisar penjualan (*Summary sales report*) adalah dokumen yang dihasilkan komputer untuk mengikhtisarkan penjualan untuk suatu periode. Berkas induk piutang usaha (*Account receivable master file*) adalah berkas untuk mencatat setiap penjualan, penerimaan kas, retur, dan pengurangan harga penjualan untuk masing-masing pelanggan dan mengelola saldo akun penjualan.
- d. Daftar saldo piutang usaha (*Account receivable trial balance*) adalah daftar jumlah terutang oleh pelanggan pada waktu tertentu.
- e. Laporan bulanan (*Monthly statement*) adalah dokumen yang dikirim kepada tiap pelanggan yang menunjukkan saldo awal piutang usaha, jumlah dan tanggal setiap penjualan, penerimaan pembayaran tunai, nota kredit yang diterbitkan, dan saldo akhir.

5. *Processing and recording cash receipt* (Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas)

Fungsi ini meliputi menerima, menyetorkan, dan mencatat penerimaan kas dengan perhatian utama adalah kemungkinan pencurian. Pencurian adalah hal penting untuk diperhatikan karena pencurian dapat terjadi sebelum penerimaan dimasukkan ke dalam catatan ataupun setelahnya. Hal lain yang penting diperhatikan adalah seluruh kas di setor ke bank dalam jumlah

yang benar, tepat waktu, dicatat di berkas penerimaan kas, dibuat jurnal penerimaan kas, memperbaharui piutang dan buku besar piutang. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah:

a. *Remittance advice* (Nota pembayaran)

Dokumen yang menyertai faktur penjualan yang dikirimkan ke pelanggan dan dikembalikan ke penjual beserta pembayaran tunai. Dokumen ini menunjukkan nama pelanggan, nomor faktur penjualan, dan jumlah faktur pada saat penerimaan pembayaran.

b. *Prelisting of cash receipt* (Daftar penerimaan kas yang disiapkan sebelumnya)

Daftar yang disiapkan oleh orang yang independen (seseorang yang tidak mempunyai akses terhadap kas dan tidak bertanggung jawab atas pencatatan penjualan atau piutang) ketika kas diterima. Dokumen ini digunakan untuk memeriksa apakah kas yang diterima, dicatat dan disetorkan dengan jumlah dan waktu yang tepat.

c. *Cash receipt journal* (Jurnal penerimaan kas)

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari pelanggan, penjualan tunai, dan penerimaan kas lainnya.

6. *Processing and recording sales return and allowances* (Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan)

Terjadi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pelanggan, maka barang tersebut dikembalikan atau diberikan pengurangan harga. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Credit memo* (Nota kredit) adalah dokumen yang berisi pengurangan jumlah yang ditagih dari pelanggan karena adanya pengembalian barang atau pengurangan harga.

b. *Sales returns and allowances journal* (Jurnal retur dan pengurangan harga penjualan) adalah jurnal untuk mencatat retur dan pengurangan harga penjualan.

7. *Charging of uncollectible accounts receivable* (Penghapusan piutang tak tertagih)

Hal ini terjadi bila perusahaan berkesimpulan bahwa suatu piutang tidak dapat lagi ditagih, maka piutang tersebut harus dihapuskan. Hal ini khususnya terjadi setelah pelanggan dinyatakan pailit. Dokumen yang digunakan adalah nota persetujuan penghapusan piutang (*uncollectible account authorization*), yaitu dokumen yang digunakan di dalam perusahaan yang menunjukkan kewenangan untuk menghapuskan piutang usaha menjadi tak tertagih.

8. *Providing for bad debts* (Penyisihan piutang tak tertagih)

Penyisihan piutang tak tertagih harus cukup mencerminkan bagian dari penjualan periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat tertagih di masa depan.

#### 2.9.4. Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan dan Piutang

Tujuan pengendalian intern menurut Arens et al yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (2003:306-307) adalah sebagai berikut:

1. Setiap transaksi yang dicatat adalah sah (Validitas)  
Sistem pengendalian intern tidak dapat memberikan transaksi fiktif dan transaksi sebenarnya tidak terjadi di dalam jurnal atau catatan akuntansi lainnya.
2. Setiap transaksi diotorisasi dengan tepat (Otorisasi)  
Transaksi yang tidak diotorisasi dapat mengakibatkan adanya transaksi yang curang dan dapat mengakibatkan pemborosan atau rusaknya aktiva perusahaan.
3. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat (Kelengkapan)  
Setiap prosedur yang diciptakan harus memberikan pengendalian untuk mencegah hilangnya setiap transaksi dari catatan.
4. Setiap transaksi dinilai dengan tepat (Penilaian)  
Sistem pengendalian intern yang memadai selalu disertai dengan produk untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan setiap transaksi.
5. Setiap transaksi diklasifikasikan (Klasifikasi)  
Setiap transaksi diklasifikasikan sesuai dengan bagan perkiraan yang telah disusun oleh perusahaan, harus ditetapkan di dalam jurnal kalau laporan keuangan hendak dinyatakan dengan tepat.

6. Setiap transaksi dicatat sesuai waktu terjadinya yang tepat (Ketepatan waktu)  
Transaksi yang dicatat sebelum atau setelah saat terjadinya akan menimbulkan kemungkinan adanya kelalaian untuk mencatatnya atau dicatat dengan jumlah yang tidak benar.
7. Setiap transaksi dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan diikhtisarkan dengan benar (*Posting* dan ikhtisar)  
Setiap transaksi diikhtisarkan (dirangkum menjadi satu) dan dijumlahkan sebelum dicatat ke dalam jurnal yang bersangkutan.”

## 2.10. Pemeriksaan

### 2.10.1. Pengertian Pemeriksaan

Ada beberapa literatur yang menjelaskan pengertian pemeriksaan (*auditing*), tetapi pada intinya menjelaskan pemeriksaan sebagai suatu aktivitas yang ditujukan untuk mengetahui apakah kondisi yang ada sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan secara umum dapat dikatakan sebagai proses perbandingan antara kondisi (kenyataan dimana keadaan yang sebenarnya melekat pada objek yang diperiksa) dengan kriteria (hal yang seharusnya dikerjakan/hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa).

Definisi pemeriksaan menurut Arens et al (2005:11) adalah sebagai berikut:

*“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competence independent person.”*

Dari definisi di muka, dapat diuraikan hal-hal seperti di bawah ini, yaitu:

#### 1. *Information* (Informasi)

Dalam melakukan pemeriksaan, harus ada informasi yang *verifiable* (dapat diuji kebenarannya) dan beberapa kriteria (standar) yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi informasi. Informasi yang digunakan auditor dalam melakukan pemeriksaan adalah informasi kuantitatif, informasi yang dapat diukur, serta dapat dipercaya atau dapat diuji kebenarannya. Kriteria yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan adalah Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP). Adapun kriteria yang dimaksud dalam SPAP adalah kesesuaian bukti dengan tujuan pemeriksaan (*relevance*), dapat dimengerti (*understandability*), ketepatan waktu (*timeliness*), memiliki daya banding (*comparability*), dan lengkap (*complete*).

2. *Accumulation and evaluating evidence* (Pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti)

*Evidence* (bukti) adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sangat penting untuk menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan dan bukti-bukti yang diperoleh tersebut dievaluasi apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak.

3. *Competent, independent person* (Orang yang kompeten dan independen)

Auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami kriteria yang digunakan dan memiliki kecakapan dalam mengumpulkan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan untuk dapat menarik kesimpulan dari pemeriksaan bukti-bukti tersebut. Auditor harus memiliki sikap mental yang bebas atau independen.

4. *Reporting* (Pelaporan)

Tahap akhir dalam proses pemeriksaan adalah menyajikan laporan pemeriksaan (*audit report*) yang merupakan penyampaian hasil temuan-temuan auditor kepada para pemakai. Laporan tersebut memberitahukan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari definisi-definisi tersebut, pada intinya pemeriksaan merupakan proses yang dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Informasi yang dimaksud adalah informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, sedangkan kriteria yang dipakai secara umum di Indonesia untuk mengukurnya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

### **2.10.2. Jenis-jenis Pemeriksaan**

Menurut Arens et al (2005:13-15) pemeriksaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

*“Financial statement audits, operational audits, and Compliance audits.”*

1. *Operational audits* (Pemeriksaan operasional)

Pemeriksaan operasional adalah pemeriksaan yang dilakukan atas prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, auditor mengajukan saran dan rekomendasi kepada pimpinan atau manajemen pada saat pemeriksaan.

2. *Compliance audits* (Pemeriksaan ketaatan)

Pemeriksaan ini bertujuan mempertimbangkan apakah klien mengikuti prosedur dan aturan tertentu yang diterapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.

3. *Financial statement audits* (Pemeriksaan laporan keuangan)

Tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang biasanya digunakan adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## **2.11. Pemeriksaan Laporan Keuangan**

### **2.11.1. Pengertian Pemeriksaan Laporan Keuangan**

Menurut Arens et al (2005:14) pemeriksaan atas laporan keuangan adalah:

*“An audit of financial statement is conducted to determine whether the overall financial statement (the information being verified) are stated in accordance with specified criteria.”*

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi yang akan diverifikasi, telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Pada umumnya, kriteria tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.

### 2.11.2. Tujuan Pemeriksaan Laporan keuangan

Menurut IAI (2001;110.1) tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah:

“Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

Sedangkan menurut Arens et al (2005:134) tujuan pemeriksaan berdasarkan SAS 1 (AU 110) adalah sebagai berikut:

*“The objective of the ordinary audit of financial statements by the independent auditor is the expression of an opinion on the fairness with which they present fairly, in all material respects, financial position, result of operations, and its cash flows in conformity with generally accepted accounting principle.”*

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemeriksaan merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Dalam melakukan pemeriksaan, seorang auditor mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk meyakinkan mereka mengenai hal kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sehingga auditor dapat mengeluarkan laporan audit yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Arens et al (2005:146-149), tujuan audit laporan keuangan terkait antara tujuan audit atas transaksi (*transaction-related audit objective*) dan tujuan audit atas saldo (*balance-related audit objective*). Perumusan tujuan audit untuk transaksi dan akun tersebut ditujukan untuk memberikan kerangka yang membantu auditor dalam pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten.

*Transaction-related audit objective* dibagi ke dalam enam bagian, yaitu:

1. Transaksi yang dicatat benar-benar ada (*Existence-recorded transaction exist*)
2. Transaksi yang ada dicatat dengan lengkap (*Completeness-existing transaction are recorded*)
3. Pencatatan transaksi yang akurat disajikan dalam jumlah yang benar (*Accuracy-recorded transactions included in the client's journals are properly classified*)
4. Transaksi yang dimasukkan dalam jurnal telah diklasifikasikan dengan benar (*Classification-transactions included in the client's journals are properly classified*)
5. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar (*Timing-transactions are recorded on the correct dates*)
6. Transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam buku besar dan diikhtisarkan dengan benar (*Posting and summarization-recorded transactions are properly included in the master files and are correctly summarized*)

Sedangkan *Balance-related audit objective* dibagi ke dalam sembilan bagian, yaitu:

1. Jumlah yang dimasukkan benar-benar ada (*Existence-amounts included exists*)
2. Jumlah yang ada telah dimasukkan (*Completeness-existing amounts are included*)
3. Jumlah atau nilai yang ada disajikan pada jumlah yang benar (*Accuracy-amounts included are stated at the correct amounts*)
4. Jumlah yang dimasukkan dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat (*Classification-amounts included in the client's listing are properly classified*)

5. Transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang benar (*Cut off-transaction near the balance sheet date are recorded in the proper period*)
6. Rincian dalam daftar saldo rekening sesuai dengan jumlah berkas induk, total dari penjumlahan daftar saldo rekening total dalam buku besar umum (*Detail tie in—details in the account balance agree with related master file amounts, foot to the total in the account balance, and agree with the total in the account balance, and agree with the total in the general ledger*)
7. Nilai asset diakui pada jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi (*Realizable value-assets are included at the amounts estimated to be realized*)
8. Hak dan kewajiban harus dimiliki sebelum dicatat dalam laporan keuangan (*Rights and obligations assets must be owned before it is acceptable to included them in the financial statement, liabilities must belong to the entity*)
9. Penyajian dan pengungkapan perkiraan yang berhubungan dengan kebutuhan pengungkapan disajikan secara memadai dalam laporan keuangan (*Presentation and disclosure-account balances and related disclosure requirements are properly presented in the financial statements*)

Menurut Arens et al (2005:383-386), tujuan pemeriksaan atas transaksi penjualan adalah:

- "1. *Existence* (Eksistensi)  
Transaksi penjualan yang dicatat adalah penjualan kepada pelanggan yang benar-benar ada dan tidak fiktif.
2. *Completeness* (Kelengkapan)  
Seluruh transaksi penjualan yang terjadi selama periode akuntansi telah dicatat.
3. *Accuracy* (Akurasi)  
Transaksi penjualan dicatat dengan benar untuk sejumlah barang yang dikirimkan dan telah dibuat fakturnya.
4. *Classification* (Klasifikasi)  
Transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan benar.
5. *Timing* (Saat pencatatan)

- Transaksi penjualan telah dicatat dalam periode yang tepat.
6. *Posting and Summarization* (Posting dan Pengikhtisaran)  
 Transaksi penjualan dicatat dengan tepat dalam buku besar piutang dan diikhtisarkan dengan benar.”

### 2.11.3. Tahap-tahap Pemeriksaan

Proses pemeriksaan merupakan suatu metode terstruktur yang mengorganisir pelaksanaan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan telah mencukupi dan kompeten guna mencapai keseluruhan tujuan pemeriksaan.

Menurut Arens et al (2005:151-153) proses pemeriksaan terdiri dari empat tahap, yaitu:

#### **Tahap I.** *Plan and Design an Audit Approach* (Perencanaan dan Perancangan Metode Pemeriksaan)

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama yang dapat mempengaruhi auditor dalam memilih pendekatan pemeriksaan yang akan ditempuhnya, yaitu:

1. Auditor harus dapat mengumpulkan bukti kompeten dan cukup; dan
2. Biaya pengumpulan bukti harus dibuat seminimum mungkin.

Tahap I ini terdiri dari tujuh langkah, yaitu:

1. Perencanaan Awal (*Preplan The Audit*)

Langkah ini dilakukan untuk menentukan apakah auditor harus menerima atau melanjutkan pemeriksaan, mengevaluasi alasan pemeriksaan, memperoleh surat penugasan (*engagement letter*) dan memilih staf untuk melakukan pemeriksaan. Standar pekerjaan lapangan pertama mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai.

Ada tiga alasan utama mengapa dalam melakukan audit diperlukan perencanaan, yaitu:

- a. Untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup.
- b. Untuk membantu menekan biaya audit.
- c. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien.

2. Mendapatkan Informasi Mengenai Latar Belakang Perusahaan Klien (*Obtain Background Information*)

Informasi tersebut dapat diperoleh dengan mempelajari dan memahami bidang industri perusahaan dan usaha klien, meninjau pabrik dan kantor klien, menelaah kebijakan perusahaan, mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan klien dan mengevaluasi kebutuhan akan tenaga spesialis dari luar.

3. Memperoleh Informasi Tentang Kewajiban Hukum Klien (*Obtain Information About Client's Legal Obligation*)

Terdapat tiga jenis dokumen yang harus diperiksa oleh auditor pada awal penugasan, yaitu akte pendirian (*corporate charter*) dan AD/ART perusahaan (*by laws*); catatan hasil rapat dewan komisaris dengan pemegang saham (*minutes of meetings*); serta surat kontrak yang ditandatangani klien (*contracts*).

4. Melaksanakan Prosedur Analitis Pendahuluan (*Perform Preliminary Analytical Procedures*)

Melaksanakan prosedur analitis awal pada tahap perencanaan merupakan bagian penting yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Tujuan dari pelaksanaan prosedur analitik ini adalah untuk memahami bidang industri dan usaha klien, menilai kelangsungan hidup perusahaan klien, mengidentifikasi kemungkinan salah saji, serta mengurangi pengujian yang lebih mendalam.

5. Menetapkan Tingkat Materialitas dan Risiko Pemeriksaan yang Dapat Diterima dan Risiko Bawaan (*Set Materiality and Assets Acceptable Audit Risk and Inherent Risk*)

Materialitas dan risiko merupakan konsep dasar yang penting untuk merencanakan pemeriksaan dan menentukan pendekatan. Pemeriksaan materialitas ini ditentukan berdasarkan pertimbangan audit serta jenis dan usaha klien. Dalam menentukan risiko audit yang dapat diterima

(*acceptable audit risk*), auditor harus meneliti kondisi perusahaan dan menilai tiap faktor yang mempengaruhi risiko pemeriksaan ini. *Acceptable audit risk* merupakan ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa syarat telah diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi *acceptable audit risk*, antara lain: tingkat ketergantungan penggunaan laporan keuangan terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, tingkat kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dikeluarkannya *audit report* serta evaluasi auditor terhadap integritas manajemen. *Inherent Risk* merupakan penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian intern. Dalam menentukan *inherent risk*, auditor hendaknya mengevaluasi informasi yang mempengaruhi risiko bawaan dan menetapkan tingkat risiko bawaan yang terdapat untuk setiap siklus, saldo dan tujuan pemeriksaan. Auditor juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor untuk menilai risiko bawaan, yaitu sifat bisnis klien, integritas manajemen, motivasi dari klien, penugasan pertama atau pengulangan, hasil pemeriksaan tahun lalu, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, transaksi tidak rutin, pertimbangan yang dibutuhkan secara benar untuk mencatat saldo dan transaksi yang terjadi, tingkat kerentanan terhadap kecurangan dan unsur-unsur pembentuk populasi.

6. Memperoleh Pemahaman Pengendalian Intern dan Menetapkan Risiko Pengendalian (*Understand Internal Control and Assess Control Risk*)

Jika perusahaan klien memiliki pengendalian intern yang memadai, tingkat risiko pengendalian (*control risk*) akan rendah dan jumlah bukti yang harus dikumpulkan dapat dikurangi. Dalam memahami pengendalian intern perusahaan, ada tiga konsep dasar yang harus diketahui, yaitu:

a. Tanggung jawab manajemen

Pihak manajemen bertanggung jawab terhadap pengendalian perusahaan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Keyakinan memadai

Dalam hal ini pengendalian intern yang baik bukan berarti bebas dari berbagai kesalahan. Kalaupun kesalahan itu ada, idealnya sepanjang tidak material. Jadi laporan keuangan tidak secara mutlak dinyatakan dengan benar.

c. Keterbatasan melekat

Pengendalian intern tidak dianggap efektif sepenuhnya. Efektivitasnya tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang yang memakainya.

7. Mengembangkan Rencana dan Program Pemeriksaan Secara Menyeluruh  
(*Develop Overall Audit Plan and Audit Program*)

Program pemeriksaan merupakan instruksi secara detail dalam pengumpulan bukti-bukti untuk suatu area pemeriksaan atau pemeriksaan keseluruhan.

**Tahap II.** *Perform Test of Controls and Substantive Tests of Transactions*  
(Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas transaksi)

*Tests of control* merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan pengendalian intern perusahaan. Prosedur audit yang dilakukan pada pengujian atas pengendalian ini, antara lain:

- a. Tanya jawab dengan pegawai klien
- b. Pemeriksaan atas dokumen dan catatan
- c. Pengamatan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian
- d. Pelaksanaan ulang terhadap prosedur dan kebijakan klien

*Substantive tests of transactions* adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan dan ketidakberesan moneter yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Pengujian substantif atas transaksi ini dapat dipersempit jika dari pengujian atas pengendalian diperoleh bukti-bukti yang mendukung dikurangnya risiko pengendalian.

Tahap ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Memperoleh bukti yang mendukung kebijakan dan prosedur pengendalian yang berpengaruh terhadap risiko pengendalian yang ditetapkan.
2. Memperoleh bukti yang mendukung kebenaran moneter transaksi.

**Tahap III.** *Perform Analytical Procedures and Test of Detail Balance*  
(Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Rincian Saldo)

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki pada laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Ada dua bagian dalam tahap ini, yaitu:

1. *Analytical Procedures* (Prosedur Analitis)

Prosedur analitis merupakan prosedur yang dilakukan untuk menilai kewajaran transaksi dan saldo secara keseluruhan. Prosedur ini mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan harapan yang dikembangkan oleh audit, prosedur ini memiliki empat tujuan, yaitu:

- a. Memahami usaha klien
- b. Menetapkan kemampuan kelangsungan hidup klien
- c. Mengindikasikan timbulnya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan
- d. Mengurangi pengujian audit terinci

2. *Test of Detail Balance* (Pengujian atas Rincian Saldo)

Pengujian terinci atas saldo merupakan prosedur khusus untuk menguji apakah terdapat kekeliruan moneter dan ketidakberesan dalam laporan keuangan. Prosedur ini difokuskan pada saldo akhir buku besar dan ditekankan pada saldo neraca. Oleh karena itu, pengujian rincian atas saldo

dilakukan paling akhir setelah pengujian-pengujian di atas, karena biaya yang diperlukan untuk melakukan pengujian rincian saldo akan sangat besar bila dibandingkan dengan pengujian lainnya.

**Tahap IV. *Complete The Audit and Issue an Audit Report*** (Melengkapi dan Mengeluarkan suatu Laporan Audit)

Setelah auditor menyelesaikan ketiga tahap di atas, perlu dilakukan pengumpulan beberapa bukti tambahan dari laporan keuangan, mengumpulkan hasil, menerbitkan *audit report*, dan mengkomunikasikan hasil yang didapat. Hal ini merupakan proses yang subjektif dan tergantung pada penilaian profesional auditor.

Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. *Review Contingent Liabilities* (Mengkaji Ulang Kewajiban Kontingensi)

Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial atas pembayaran di kemudian hari kepada pihak lain yang belum diketahui besarnya, yang berasal dari aktivitas yang telah dilakukan. Kewajiban ini harus diungkapkan dalam catatan kaki pada laporan klien. Auditor harus memastikan bahwa pengungkapan tersebut telah memadai.

2. *Review For Subsequent Events* (Mengkaji Ulang Transaksi atau Peristiwa Setelah Tanggal Neraca)

Pengkajian ulang terhadap transaksi atau peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca perlu dilakukan untuk menentukan apakah transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi kewajaran penyajian atau pengungkapan laporan keuangan yang sedang diperiksa.

3. *Accumulate Final Evidence* (Mengumpulkan Bukti Akhir)

Auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan bukti-bukti akhir yang berkaitan dengan semua siklus. Meliputi pelaksanaan prosedur analitis akhir, evaluasi *going concern assumption*, memperoleh *client representation letter*, dan membaca informasi lain dalam laporan tahunan untuk menjamin konsistensi dalam laporan keuangan.

4. *Issue Audit Report* (Mengeluarkan Laporan Audit)

Opini dalam laporan audit yang dikeluarkan, tergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan audit (*audit findings*)

5. *Communicate With Audit Committee and Management* (Mengkomunikasikan Hasil Audit dengan Komite Audit dan Manajemen)

Auditor diminta untuk mengkomunikasikan semua hasil audit kepada komite audit atau manajemen tingkat atas, baik mengenai semua ketidakberesan yang dirasakan atau juga mengenai kekurangan pada rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern.

## 2.12. Hubungan Penilaian Pengendalian Intern dengan Luas Pemeriksaan

Dalam menjalankan pemeriksaan, akuntan publik mempunyai kepentingan untuk melakukan penilaian atas pengendalian intern agar diperoleh suatu pemahaman yang memadai, sebagaimana yang disebutkan dalam standar kedua dari standar pekerjaan lapangan.

Adapun tujuan penilaian pengendalian intern adalah untuk mengetahui keandalan pengendalian intern yang ada dan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan luas pengujian yang harus dilakukan serta prosedur pemeriksaan yang akan digunakan. Selain itu, untuk memberikan saran-saran perbaikan kesalahan atas pengendalian intern klien yang biasanya disampaikan dengan *management letter*.

Di dalam luas pemeriksaan, berapa banyak sampel yang harus diambil tergantung dari hasil penilaian auditor terhadap pengendalian intern klien. Oleh karena itu terdapat hubungan yang erat antara hasil penilaian pengendalian intern dengan luas prosedur pemeriksaan. Jika hasil penilaian pengendalian intern baik atau efektif, dengan begitu luas pemeriksaan akan dapat dipersempit (jumlah sampel yang digunakan dapat dikurangi). Dan sebaliknya, jika hasil penilaian pengendalian intern tidak baik dan tidak efektif, dengan begitu luas pemeriksaan harus diperluas (jumlah sampel yang digunakan harus diperbanyak).